



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi
	: 1. Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. 2. Kusnanto Anggoro, Ph.D. 3. Curie Maharani Savitri, Ph.D.
Hari, Tanggal	: Selasa, 22 Maret 2022
Pukul	: 14.31 WIB – 15.49 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat	: H. Anton Sukartono Suratno, M.Si., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	: Masukkan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji concerning Cooperation in the Field of Defence</i>).
Hadir	: PIMPINAN: 1. Meutya Viada Hafid (F-PG) 2. Drs. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan) 3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra) 4. H. Anton Sukartono Suratno, M.Si. (F-PD) 5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
	ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 6. Puan Maharani 7. Dede Indra Permana, S.H. 8. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS 9. Junico BP Siahaan, S.E. 10. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol. 11. Ir. Rudianto Tjen 12. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si. 13. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.

14. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.
15. Drs. Mukhlis Basri
16. Itet Tridjajati Sumarijanto

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

17. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
18. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
19. I. Lodewijk F. Paulus
20. Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.H., S.E., MAF., M.H.
21. H. Alex Noerdin

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

22. Sugiono
23. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
24. Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Sc.
25. Rachel Maryam Sayidina
26. Fadhlullah, S.E.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

27. Prananda Surya Paloh
28. Muhammad Farhan
29. Kresna Dewanata Phrosakh
30. Hasbi Anshory, S.E., M.M.
31. Hillary Brigitta Lasut, S.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

32. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
33. Dr. (H.C.) H. A Muhaimin Iskandar, M.Si.
34. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
35. A. Helmy Faishal Zaini
36. H. Bachrudin Nasori, M.Si., M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

37. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
38. H. Darizal Basir, S.Sos., M.B.A.
39. Teuku Riefky Harsya

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

40. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
41. H. Sukamta, Ph. D.
42. H. Ahmad Syaikhu
43. Dr. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

44. Ir. Alimin Abdullah
45. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
46. Hj. Farah Puteri Nahlia, M.Sc.
47. Slamet Ariyadi, S.Psi.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

48. H. M. Arwani Thomafi

49. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.

Anggota yang Izin :

1. Nurul Arifin, M.Si. (F-PG)

2. Christina Aryani, S.E., S.H.,

M.H. (F-PG)

3. R. Imron Amin, S.H., M.H. (F-GERINDRA)

4. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)

Undangan

: 1. Pakar/Akademisi, Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

2. Pakar/Akademisi, Kusnanto Anggoro, Ph.D.

3. Pakar/Akademisi, Curie Maharani Savitri, Ph.D.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Saudara Kusnanto Anggoro, Ph.D

Saudari Curie Maharani Safitri, Ph.D

Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 16 Maret 2022 memperhatikan perkembangan Covid-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta yang sudah ditetapkan menjadi level 2, maka pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, komisi, dan badan dan Rapat Paripurna akan diatur sebagai berikut:

1. Kehadiran peserta rapat pada setiap alat kelengkapan dewan, komisi, dan badan dan Rapat Paripurna berjumlah banyak paling banyak 80% dari kapasitas ruang rapat.
2. Peserta rapat yang tidak dapat mengikuti rapat secara hadir secara fisik dapat mengikuti secara virtual.
3. Waktu penyelenggaraan rapat-rapat pada alat kelengkapan dewan, komisi, dan badan dan Rapat Paripurna dilaksanakan maksimal sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Lama pelaksana rapat maksimal dua setengah jam dengan rapat-rapat prosedur kesehatan secara ketat untuk rapat-rapat agenda khusus, rapat gabungan komisi uji kelayakan fit dan proper beserta yang hadir fisik akan protokol kesehatan yang akan ditentukan kemudian ini berlaku mulai tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut .

Berdasarkan informasi dari sekretariat rapat hari menjelaskan secara tatap muka dan telah dihadiri oleh fisik 4 orang dan virtual 4 orang dengan fraksi 5, yaitu Gerindra, PDIP, Fraksi Golkar, dan Demokrat PKB, PKS. Sebagaimana amanat pasal 282 ayat (1) tatib perlu kita sepakati terlebih dahulu apakah rapat pada hari ini bersifat terbuka atau tertutup, bagaimana Prof? Kita mau terbuka atau tertutup? Terbuka ya? Baik, terbuka.

**RAPAT DIBUKA PUKUL 14.31 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU: 1X)**

Dalam rangka menindak lanjuti penugasan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 3 Februari 2022 yang menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence* sebelum memasuki pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut Komisi I DPR RI dapat melaksanakan RDPU dengan pakar atau akademisi.

Rapat Dengar Pendapat Umum, RDPU Komisi I DPR RI dengan Pakar Akademisi yaitu dengan.

1. Saudara Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D
2. Saudara Kusnanto Anggoro, Ph.D
3. Saudari Curie Maharani Savitri, Ph.D

Pada hari ini kita ingin mendengarkan masukan terhadap RUU tentang Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D, Saudara Kusnanto, Ph.D dan Saudari Curie Maharani Savitri, Ph.D untuk menyampaikan paparannya waktu dan tempat kami persilakan.

PAKAR/AKADEMISI (PROF. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D.):

Yang saya hormati Pimpinan Rapat.

Yang terhormat Anggota Komisi I dari berbagai fraksi.

Yang saya hormati narasumber yang saya hormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera kita semua.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya kepada saya untuk memaparkan pandangan akademik terhadap persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Fiji tentang kerja sama bidang pertahanan. Saya dari akademisi guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Selanjutnya *slide* selanjutnya pemaparan saya berjudul pandangan akademik terhadap persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang kerja sama bidang pertahanan. Nah pertama mengenai secara umum bahwa persetujuan kerja sama ini adalah salah satu amanat dari alenia ke empat pembukaan Undang-undang Dasar '45 tentang Kerja Sama Internasional. Yang kedua mengenai sektor pertahanan ini berpengaruh langsung kepada kepentingan nasional dan ketiga aspek persetujuan kerja sama pertahanan itu diwujudkan dalam bentuk instrumen hukum yang disebut dengan persetujuan atau perjanjian ini, perjanjian atau persetujuan kerja sama.

Selanjutnya pemaparan saya, singkat saja mengenai persetujuan ini. Yang saya akan teliti, pertama dan satu-satunya ya apakah persetujuan kerja sama ini merugikan kepentingan RI dan kalau memang merugikan apakah tidak perlu disetujui? Itu permasalahan yang saya angkat dari pandangan akademik.

Dan pemaparan saya singkat terdiri dari dua isu. Satu, mengenai muatan persetujuan. Jadi melihat norma-norma aturan-aturan hukum yang ke sembilan pasal-pasal dalam persetujuan ini dan pemaparan saya selanjutnya adalah implikasi hukum ya. Jadi saya batasi kepada hukumnya saja. Nanti rekan Pak Anggoro dan rekan Ibu Safitri akan menjelaskan dari aspek lainnya.

Muatan perjanjian itu seperti halnya perjanjian-perjanjian atau persetujuan kerja sama di bidang pertahanan dengan negara-negara sahabat menggambarkan pasal-pasal seperti berikut ya. Tujuan Pasal 1, Pasal 2 mengenai Ruang Lingkup Kerja Sama, Pasal 3 mengenai Pejabat Berwenang, Pasal 4 mengenai Kerahasiaan dan Pasal 5 mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual, Pasal 6 mengenai Pengaturan Keuangan, Pasal 7 mengenai Penyelesaian Perselisihan dan 8 Amandemen Persetujuan dan Nomor 9 Pasal 9 Pemberlakuan Jangka Waktu dan Penghentian Persetujuan ya.

Tujuan dari persetujuan itu di bidang kerja sama pertahanan dengan prinsip-prinsip utama di dalamnya yaitu prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, penghormatan kedaulatan, dan integritas wilayah. Dan ini saya lihat redaksinya sama dengan persetujuan-persetujuan yang diadakan Pemerintah Republik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Dan lingkup kerja samanya pertukaran kunjungan, dialog konsultasi, peningkatan kapasitas pertukaran intelijen militer, peningkatan industri pertahanan dan lainnya. Dan pejabat yang

berwenang di sini tunjuk di Indonesia Kemenhan dan nomor Pasal 4 itu kerahasiaannya seluruhnya bersifat rahasia ya itu kecuali ya. Kecuali dalam pembahasan sekarang di DPR ini.

Kemudian nomor 5 perlindungan HKI itu adalah dilindungi ya dilindungi secara hukum. Pengaturan keuangan itu masing-masing pihak dan penyelesaian perselisihan secara damai. Amandemen persetujuan atas persetujuan para pihak dan persetujuan berlaku untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Selanjutnya kini *slide* selanjutnya. Nah implikasi hukum yang saya akan paparkan secara singkat adalah apakah persetujuan ini merugikan bagi Indonesia? Apakah perjanjian ini menguntungkan dan bagaimana akseptabilitas persetujuan? Dan kesimpulan dari aspek hukum dan saran.

Sengaja saya di dalam pemaparan sarang berbeda dengan pemaparan-pemaparan persetujuan lainnya ya semacam Swedia terakhir dengan Arab Saudi. Nah sekarang saya disini hanya melihat aturan hukumnya ya bagaimana hukumnya. Karena saya lihat persetujuan ini ya sedikit banyak ada aspek sensitivitasnya nanti Pak Anggoro dengan narasumber akan menjelaskan kesana. Jadi saya batasi ke aspek hukum saja.

Implikasi kerugian persetujuan bagi Indonesia ya ada tidak. Ini saya lihat dari 9 pasal yang diatur di dalamnya secara singkat saja ya tidak perlu saya uraikan satu-satu itu tidak ada yang merugikan ya karena aturannya begitu apa begitu umumlah ya. Karena tujuannya misalnya kerja sama di bidang pertahanan dengan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah itu sudah dibatasi oleh prinsip yang utama ini.

Selebihnya aturan-aturannya pertukaran kunjungan, dialog, peningkatan kapasitas, pertukaran intelijen militer, peningkatan-peningkatan industri pertahanan saya lihat itu positifnya untuk Indonesia ya. Tadi ada yang merugikan. Dan mengenai kerahasiaanpun itu dilindungi penyelesaiannya pun secara damai dan masa berlakunya pun relatif singkat ya 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Selanjutnya, *slide* selanjutnya. Nah kesimpulan dari pemaparan tadi, norma-norma pengaturan dalam persetujuan tidak merugikan Indonesia. Itu kesimpulan yang pertama. Kedua mengenai implikasi keuntungan bagi Indonesia secara hukumnya ya secara norma-norma hukum dari kesembilan pasal yang diatur tujuan ruang lingkup dan seterusnya itu seluruhnya positif bagi Indonesia ya positif. Karena khususnya untuk ruang lingkup itu yang mengatur *scope* perjanjian saya cetak *bold* untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan industri pertahanan itu sangat penting bagi kita. Ya sangat penting karena dari segi industri pertahanan kita relatif jauh lebih, lebih dominan dari pada Fiji nanti rekan narasumber Ibu Safitri yang akan menambahkan ini.

Selanjutnya, nah kesimpulan dari norma-norma aturan yang nanti dalam persetujuan itu menguntungkan Indonesia terutama ketentuan mengenai peningkatan kapasitas dan industri pertahanan ya. Itu itu yang segi menguntungkannya. Selanjutnya, nah implikasi akseptabilitas persetujuan ini persetujuan hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya itu diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 24 tahun 2000. *Slide* selanjutnya dan kedua akseptabilitas ini adalah persetujuan DPR ya mengenai undang-undang perjanjian internasional. Itu akseptabilitas di dalam negeri. Selanjutnya.

Nah ini terakhir saja bahwa penelitian saya menunjukkan bahwa persetujuan ini penting bagi kita ya tapi akseptabilitas keluarnya nanti Pak Anggoro akan menjelaskan masalah-masalah yang ada di luar persetujuan ini yang saya anggap sedikit banyak sensitivitasnya. Mengenai aspek wilayah, aspek waktu, dan personal ya, aspek personalnya ini sedikit saja saya angkat adanya kritik-kritik ya dari ak ademisi di sana. Juga ya kritiklah. Jadi ini lebih banyak persoalan internal-eksternal Pemerintah Fiji daripada kita.

Kesimpulannya dari aspek hukum kesembilan ketentuan pasal dalam persetujuan kerja sama pertahanan Indonesia Fiji tidak merugikan kepentingan Indonesia. Itu menjawab

permasalahan yang saya angkat dalam pemaparan ini ya dan dari aspek hukum persetujuan dapat direkomendasikan.

Terima kasih Pak Pimpinan yang terhormat. Demikian pemaparan singkat saya mengenai tinjauan dari aspek hukum mengenai kesembilan pasal persetujuan pertahanan Indonesia Fiji terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Terima kasih Pak Huala Adolf Profesor selanjutnya Pak Kusnanto Pak Profesor silakan.

PAKAR/AKADEMISI (KUSNANTO ANGGORO, PH.D.):

Pak Pimpinan boleh izin kalau rekan saya Curie Maharani Safitri lebih dulu nanti saya akan yang paling akhir.

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Baik Bapak jadi gong nya Pak ya kita izinkan kalau begitu silakan.

PAKAR/AKADEMISI (KUSNANTO ANGGORO, PH.D.):

Terima kasih. Curie.

PAKAR/AKADEMISI (CURIE MAHARANI SAVITRI, PH.D.):

Terima kasih.

**Selamat Siang Anggota Dewan yang terhormat.
Para narasumber guru saya Mas Kusnanto Anggoro.**

Terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan. Kalau Pak Profesor Huala tadi bicara mengenai aspek hukum saya akan bicara pada aspek yang sangat praktis sebenarnya yakni kepentingan strategis Indonesia dan arah kerja sama yang sebaiknya dibangun dari apa kesepakatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Fiji.

Mohon *next slide*. Jadi berbeda dengan kerja sama pertahanan sebelumnya yang pernah kita bahas di sini misalnya dengan Swedia atau dengan Thailand. Indonesia dan Fiji mungkin lebih banyak tidak sama dengan tidak ada kepentingan strategisnya mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi kesamaan dan perbedaan secara kondisi geografis kita sama-sama berada di lokasi *ring of fire* yang rawan bencana sehingga kita punya masalah keamanan yang mirip. Tapi tidak berarti kemudian menjadi saling tergantung dalam hal tersebut.

Kemudian juga mohon maaf saya buka di sini saja karena saya nggak bisa baca yang di sana. Kemudian yang kedua juga kita sama-sama punya peran secara regional di dalam sub region masing-masing Indonesia adalah *de facto* pemimpin ASEAN. Fiji meskipun dalam skala yang berbeda adalah juga *hub* dari negara-negara Pasifik jadi Fiji sebagai sebuah negara itu punya peranan penting baik itu secara diplomasi secara pembangunan teknologi, salah satu yang paling baik ya pembangunan ekonominya dan paling pesat. Kemudian juga banyak organisasi internasional dan perwakilan diplomatik yang menaruh perwakilannya di Fiji ya yang juga melayani negara-negara sekitarnya. Dan Fiji juga berperan penting dalam kelompok

Melanesian Sparehead Group ya dimana beberapa anggotanya terutama Vanuatu memang sering menggugat pihak masalah kedaulatan Republik Indonesia.

Salah satu hal lain yang menjadi poin plus Fiji adalah memang mereka mengundang Indonesia ya sebagai salah satu apa anggota untuk MSG ini, jadi kita mendapatkan dukungan untuk penguatan kedaulatan dari Fiji. Dan yang ketiga adalah bahwa kita dengan Fiji sama-sama aktif dalam pasukan perdamaian PBB sehingga ini bisa menjadi satu kesempatan untuk mencari titik temu kepentingan strategis bersama.

Tapi sebenarnya kalau kita lihat, *next slide* kita tidak berbagi ketergantungan keamanan atau *security interdependence* dengan Fiji. Artinya kalau mungkin kita tidak punya kerja sama pertahanan dengan Fiji ya tidak apa-apa gitu ya. Ada *tools* diplomasi yang lain bisa dimainkan begitu ya dan kalau kita melihat disini perbedaan antara Fiji dengan Indonesia itu sangat mencolok dari segi GDP kita itu 220 kalinya Fiji. Dari segi anggaran pertahanan kita 82 kali. Dari segi jumlah angkatan bersenjata kita 97 kali dari mereka dan ini menunjukkan bahwa kerja sama apapun nanti kita lakukan ke depan dengan Fiji itu akan jadi kerja sama asimetrik. Artinya kita akan diharapkan untuk lebih kepada yang penyedia bantuannya ketimbang kita mengharapkan resiprokal. Nah ini menjadi satu tantangan hatinya karena sejauh apa DCA ini bisa diimplementasikan adalah sejauh apa juga dia bisa memenuhi harapan dari kedua aktor pertahanan mengenai *reciprocity*.

Lalu kalau kita lihat juga dari segi kekuatan Fiji ya kekuatan pertahanan dari segi sistem atau sistem senjatanya mereka. Mereka amat sangat tidak terbangun angkatan bersenjatanya ya. Jadi kita tidak bisa melihat Fiji sebagai satu potensi market ataupun kerja sama industri. Rasanya terlalu jauh dan agak memaksakan ya. Meskipun kita bisa pahami butir-butir yang ada di dalam DCA itu lebih bersifat umum ya bisa ditemukan di berbagai tempat tapi kita juga harus realistis dalam hal ini dan apa memikirkan juga apa yang bisa implementasikan dan yang tidak begitu ya. Anggaran pertahanannya Fiji juga tadi saya sebutkan sangat kecil. Jadi tidak realistis kalau misalnya kita mengharapkan Fiji tadi selain menjadi mitra untuk pengguna alutsista kita juga menjadi mitra industri pertahanan maupun mitra-mitra lain yang terkait dengan pengembangan kekuatan.

Kalau kita lihat memang seberapa penting interaksi pertahanan ya kita dengan Fiji ini bisa dilihat di *slide* berikut. Jadi ini saya dibantu oleh asisten saya di kampus Mas Idel untuk membuat secara cepat ya data mengenai interaksi yang dilakukan oleh Indonesia dan Fiji yang diberitakan di media. Jadi kalau yang tidak diberitakan ya kita nggak bisa memasukkan dan memang dari sekitar 47 kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara yang mendominasi adalah isu-isu kerja sama yang bersifat perempuan dan anak pembangunan, pertanian, perikanan, ya pendidikan. Jadi isu-isu tersebut yang lebih terkait dengan pembangunan baik itu fisik maupun manusia.

Meskipun begitu kalau kita lihat dari angkanya interaksi pertahanan itu cukup banyak. Jadi untuk kerja sama pertahanan keamanan Indonesia dengan Fiji itu ada sekitar 15% dan 8% ya didominasi oleh pertahanan kemudian juga kita *human intern assistance and disaster relief* kita beberapa kali membantu Fiji baik itu melakukan *training* maupun juga untuk mengatasi bencana di sana ya itu sekitar 8% dari keseluruhan interaksi kita.

Dan memang dari kerja sama bilateral ini yang mencakup pertahanan dan non pertahanan itu Indonesia selalu diposisikan sebagai pihak yang memberi. Mendukung, memberikan bantuan sedangkan Fiji diposisikan untuk menjadi penerima dan beberapa kali mereka terlihat datang lebih, lebih sering mendatangi kita ketimbang kita mendatangi mereka dan memang sebenarnya ini tidak masalah ya. Yang namanya power antar negara tidak selalu seimbang tapi kemudian tantangan ke depannya adalah apakah aktor pertahanan kemudian punya persepsi yang sama mengenai kepentingan strategis kita untuk melaksanakan DCA ini dengan Fiji.

Next slide tolong, ini adalah beberapa interaksi antara sektor pertahanan kita dengan Fiji dalam 10 tahun terakhir ya. Kita menerima kunjungan kemudian penandatanganan kerja sama dan mereka datang ke Indo Defense Expo kita kemudian juga ada Angkatan Laut. Ini kita belum menemukan data kita mendatangi mereka atau misalnya kita mengirim misi khusus ya ke Fiji. Saya tidak tahu kenapa dan saya belum sempat mendalami juga sentimen dari teman-teman di angkatan bersenjata dan Kemhan tapi akan menarik nanti untuk melihat seperti apa persepsi mereka mengenai kerja sama ini.

Selanjutnya kalau kita melihat butir-butir DCA yang tadi sudah dibahas oleh Pak Profesor memang bahasanya itu dan cakupan kegiatannya itu cukup umum ya. Saking umumnya tadi terkesan abai dengan potensi kerja sama masing-masing sebenarnya. Tapi tidak apa-apa karena ini kan apa bisa didefinisikan lagi ya terutama untuk klausul bidang-bidang yang lain.

Permasalahan yang mungkin harus nanti ditambahkan dalam kajian akademik DPR adalah bagaimana memastikan DCA ini begitu diratifikasi dia akan cepat bisa diimplementasikan. Yang pertama kita punya catatan kurang baik mengenai jarak antara penandatanganan DCA dengan ratifikasi. Rata-rata lebih dari 5 tahun menurut kajian 45 dan itu kita belum menghitung berapa lama dari ratifikasi ke implementasi perjanjiannya. Ketika kita membahas kerja sama Swedia dan Korea, ada beberapa kerja sama yang ya sudah *by pass* ratifikasi DCA belum tapi kerja samanya sudah lari itu. Tapi kemudian kita melihat ada batas maksimum dimana kerja sama itu bisa dilakukan karena apa karena peralatan pendukungnya belum ada dan bisa jadi ada perbedaan persepsi antara aktor tergantung kepentingan tergantung *budget* gitu ya dan karena prioritasnya juga berbeda. Bagaimana ini nanti kita pastikan DCA dengan Fiji meskipun dia tidak melayani kepentingan strategis pertahanan tapi dia tetap bisa diimplementasikan untuk menjamin kepentingan nasional kita yang lain. Ini menjaga kedaulatan kemudian juga nanti akan dijelaskan oleh Pak Kustanto mengenai geopolitik di sana bagaimana Fiji bisa berperan penting untuk menetralkan kompetisi *major power* di sana jadi kita punya kepentingan yang memang strategis dan jauh lebih besar dari pada pertahanan.

Nah ini kita membutuhkan nantinya ada jaminan bahwa ratifikasi setelah dilakukan itu akan ada kelompok kerja ad-hoc ya yang didorong untuk membuat implementasi perundang-undangan domestik dan kemudian masing-masing aktor yang terlibat itu punya persepsi yang sama.

Next ini adalah *slide* terakhir saya. Kira-kira ini yang bisa saya usulkan untuk dieksplorasi ke depan nanti untuk memaksimalkan DCA Fiji. Jadi ada tiga yang bisa kita coba *explore* nantinya untuk meyakinkan *stakeholder* ini harus dijalankan setelah diratifikasi. Yang pertama adalah kita mengubah persepsi Fiji sebagai target *market* industri pertahanan kita sebagai pembeli. Karena tadi ya kita melihat *budget* militernya Fiji tidak mungkin. Tapi ada peluang dari Fiji sebagai kontingen pasukan perdamaian PBB yang akan didukung ya secara alutsista oleh PBB melalui misalnya sewa begitu ya. Negara-negara besar seperti India dengan Tiongkok mereka bisa menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh pasukan perdamaian dari negara-negara yang lebih kecil dan Indonesia mungkin bisa menjajaki melakukan hal yang sama kepada Fiji tidak dengan menjual tapi dengan melakukan sewa. Dan menurut kami karena ini misinya adalah di bawah PBB itu harusnya dianggap sebagai satu misi yang *justified* atau netral bukan dianggap sebagai agresifitas Indonesia untuk masuk ke wilayah Pasifik dan mencoba untuk menetapkan pengaruh disana.

Misi yang kedua adalah ini sebenarnya sudah berjalan dan perlu di apa elaborasi dan di tingkatkan lagi adalah *human intern assistant* dan *disaster relieve*. Karena memang permasalahan *global warming* disana itu menjadi permasalahan eksistensial *thread* Fiji dimana kita juga sebenarnya sudah harus mulai dilakukan seperti ini juga. Dan salah satu peran dari TNI yang bisa dilakukan adalah mengirimkan misi-misi seperti rumah sakit apung ya.

Kita punya beberapa rumah sakit yang kapal rumah sakit yang selama ini masih difungsikan secara internal ini bisa menjadi sebuah alat diplomasi pertahanan yang sangat baik. Rumah sakit itu kan apa ya apa sih yang lebih netral lagi dari rumah sakit gitu ya tidak ada tapi dampaknya bahwa kita terlihat peduli kepada mereka dan juga ini akan membentuk persepsi yang baik ya mengenai Tentara Indonesia di mata Fiji juga.

Yang ketiga adalah ini juga nanti dieksplorasi lebih lanjut. Kerja sama persiapan pemberangkatan pasukan perdamaian PBB dan juga *co-deployment* antara pasukan Indonesia dengan PBB. *Co-deployment* mungkin nanti akan membuka jalan kita untuk menyewakan peralatan kepada mereka ya. Kerja sama persiapan ini kita bisa belajar juga dari Fiji yang punya pengalaman yang cukup banyak ya untuk *co-deployment* dan juga penguasaan bahasa yang mungkin lebih baik daripada kita dan Fiji sudah melakukan ini dengan misalnya Australia. Dari pada ini disediakan oleh Australia kenapa tidak Indonesia yang memang kepentingannya netral di sana gitu ya. Jadi dengan cara yang ini kita secara tidak langsung membantu Fiji juga untuk menetralkan dirinya dari kepentingan dari apa persaingan kepentingan negara-negara besar di Pasifik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Last but not least ini yang kita tunggu-tunggu gongnya Profesor Kusnanto Anggoro waktu dan tempat kami persilakan Pak.

PAKAR/AKADEMISI (KUSNANTO ANGGORO, PH.D.):

Terima kasih sekali Bapak Pimpinan dan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih juga kepada Profesor Huala dan kepada rekan saya Curie Safitri yang telah menyampaikan paparan. Sangat membantu saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan masih cukup bermanfaat untuk kita kaji bersama. Mohon maaf karena tidak dalam bentuk *power point* karena makin lama saya kelihatan makin kehilangan poin dan tidak mempunyai *power*. Jadi terpaksa narasinya dalam bentuk biasa dan itu pun ada banyak salah cetak saya kira salah ketik karena kebetulan saya menulis di *mobile phone* di *handphone*.

Saya setuju dengan kesimpulan ataupun paparan yang sudah disampaikan sebelumnya yaitu yang terkait misalnya dari segi hukum tidak ada keberatan sama sekali sebenarnya tentang rencana ratifikasi persetujuan Indonesia-Fiji di bidang pertahanan negara. Saya setuju juga dengan apa yang disampaikan tadi oleh rekan saya Curie bahwa ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan lebih lanjut kerja sama antara Indonesia dan Fiji itu.

Apalagi Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat saya selalu membayangkan bahwa Indonesia itu suatu saat akan menjadi negara *middle power* bukan hanya *middle income* tapi *middle power* dan salah satu ciri dari *middle power* itu adalah sebuah negara yang mempunyai *concern* atau kepedulian terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar wilayah dan akan sangat baik tentu saja kalau kepedulian itu antara lain ditunjukkan dengan cara membantu.

Jadi kalau tadi biasanya disampaikan oleh rekan saya Curie bahwa kita tidak bisa banyak berharap dari penjualan senjata misalnya karena ekonomi Fiji memang rendah. Bagi saya sih oke-oke saja karena ini memberi peluang bagi kita untuk bisa berbuat sesuatu sebagai sebuah negara yang bahasa Jawa-nya itu *sembodo*. *Sembodo* itu artinya ya cocok lah sesuai antara *kodrat* dengan harapannya. Nah itu mungkin baru tahun 2045 kalau sesuai dengan mimpi-mimpi yang selama ini sering kita bicarakan.

Tapi tentu tidak ada salahnya kalau kita mempersiapkan mulai dari sekarang dalam waktu kurang lebih 25 tahun ke depan saya kira terjadi banyak perubahan. Dan oleh sebab itu saya kira kerja sama antara Indonesia dan Fiji bisa menjadi salah satu model dalam beberapa hal. Termasuk di antaranya adalah model bagaimana proses ratifikasi itu dilakukan antara Pemerintah dengan DPR. Karena saya yakin bahwa ratifikasi adalah merupakan sebuah proses politik. Ketika terjadi hubungan yang *dialogical* konstruktif antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang berbagai isu terutama dalam konteks ini adalah isu-isu tentang pertahanan dan tentu saja itu sangat terkait dengan isu-isu diplomasi atau politik luar negeri Indonesia. Jadi ini ratifikasi merupakan sebuah proses politik untuk membangun hubungan yang lebih baik dari segi transparansi dan akuntabilitas kebijakan dan sebagainya dan sebagainya.

Nah dari segi itu saya kira saya melihat ada sesuatu yang kurang ya, tidak di dalam undang-undang ratifikasinya. Tetapi sulit untuk melacak bagi kami bagi saya khususnya sebagai orang awam akademisi begitu, apakah apa yang sudah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya itu juga dilaksanakan oleh Pemerintah? Jadi agak sulit ini untuk melihat itu bagi saya jarang sekali berita-berita itu terdengar di publik tentang seberapa jauh kerja sama di bidang intelijen, kerja sama di bidang latihan militer dan segala macam itu saya pernah duduk di tempat ini tahun 2014, 15, 16, 17 untuk masalah serupa dalam kerja sama dengan Pakistan, kerja sama dengan Thailand, kerja sama dengan Ukraina misalnya gitu. Tapi sampai sekarang nggak pernah dengar apa sih yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam konteks kerja sama pertahanan dengan Iran dengan Pakistan dengan Thailand jarang sekali. Yang tidak terlalu sulit untuk dilihat adalah bahwa kita akan membeli Rafale dari Prancis misalnya dan sebagainya itu yang ada di publik. Tapi ratifikasi itu kemudian saya kira sampai sekarang belum cukup optimal sebagai sebuah instrumen untuk mendekatkan hubungan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang kedua adalah kalau kita lihat undang-undang Ratifikasi dari beberapa yang tipikal itu sebagian besar kalau tidak semuanya itu isinya 2 pasal atau paling jauh 3. Pasal 1 misalnya adalah yang pada prinsipnya mengesahkan atau menetapkan atau memutuskan untuk diratifikasi. Pasal 2 itu mulai berlakunya kira-kira begitu. Kadang-kadang saya bertanya juga kalau hanya ada dua Pasal itu bagaimana kemudian Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengoptimalkan perannya sebagai *check and balances* dalam beberapa hal dengan pemerintah. Karena bukan tidak mungkin ketika Dewan Perwakilan Rakyat bertanya tentang sesuatu pemerintah akan menjawab tidak ada kewajiban undang-undang bagi kami untuk menjawab persoalan itu.

Nah sebagai warga negara saya merasa dirugikan Pak Pimpinan jadi itu sebabnya kenapa bukan tidak mungkin sebenarnya kalau kita menyisipkan 1-2 pasal di antara Pasal 1 dan Pasal 2 dalam tradisi penulisan Undang-Undang Ratifikasi itu yang intinya adalah bagaimana nanti barangkali mengatur tentang mekanisme prosedur, substansi, persyaratan agar sesuatu yang diratifikasi itu dapat menjadi bagian dari agenda penting antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah kira-kira itu yang dalam bayangan saya menjadi sesuatu yang saya kira sangat apa sangat penting.

Nah kalau tentang lampirannya sendiri malah setuju dengan Profesor Huala, ndak soal. Lampiran yang ada di Undang-undang Ratifikasi itu umumnya adalah *practices* yang

sudah dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah lain. Katakanlah kalau dalam konteks Fiji kita juga sudah melakukan beberapa latihan di bidang *medical training* kita sudah melakukan beberapa latihan di *peacekeeping operation* dan seterusnya. Jadi disitu item yang disebut termasuk di antaranya adalah kunjungan kemudian adalah dialog kemudian intelijen militer dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2011 kalau nggak salah tadi ya atau 2017 persisnya. Tergantung bagaimana kita menilainya. Kalau sebelum 2017 itu artinya sebelum ada *memorandum of understanding* kalau setelah 2017 itu kira-kira setelah ada kesepakatan resmi dalam tingkat *memorandum of understanding* antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Fiji. Meskipun secara keseluruhan juga kali pertemuan saya kira dalam 12-11 tahun terakhir 2 tahun sekali saya tidak bisa menganggap itu sebagai sesuatu yang intensif kira-kira begitu logikanya.

Tapi sekali lagi poin yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah masalahnya tidak ada di tidak berada pada ruang lingkup kesepakatan seperti tertulis di dalam lampiran Undang-Undang Ratifikasi tapi bagaimana kemudian itu akan dioperasionalkan lebih lanjut.

Nah sayang sekali ada satu masalah lain yang juga terkait dengan itu tidak berada pada Undang-undang Ratifikasi-nya dan juga tidak pada *memorandum of understanding* tapi pada ini Bapak Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat pada naskah akademik. Naskah akademik-nya sih oke bagus kurang lebih begitu tapi menurut saya ada dua kekurangan penting. Satu adalah tidak ada sesuatu yang secara khusus ditampilkan dari situ dari Fiji. Misalnya tadi rekan saya menyebut tentang bagaimana *melanesian sparehead group*.

Lalu kemudian soal Papua, saya yakin itu merupakan sesuatu yang amat penting kita tahu dalam beberapa tahun ke depan Papua masih akan menjadi isu internasional yang mempunyai teman baik di Pasifik Selatan, Fiji merupakan sesuatu yang sangat urgen dugaan saya. Tapi tidak ada satu kata pun di dalam naskah akademik itu kata Papua. Yang ada adalah Papua Nugini. Ini artinya bahwa apa di naskah akademiknya agak *missed* ya kurang lebih begitu. Tidak perlu dicari siapa yang salah saya kira itu Kementerian Pertahanan yang menyiapkan itu apa namanya tidak cukup melihat persoalan itu sebagai persoalan yang urgen. Lalu BPHN yang *sinergizing* dari draf itu kelihatannya juga tidak cukup menambahkan barangkali begitu. Tapi saya tahu bahwa Papua akan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam konteks hubungan Indonesia dengan Fiji karena meskipun negara itu bisa dibilang maaf tidak cukup kuat atau tidak berarti karena kecilnya dari segi *gross domestic product* maupun jumlah tentara dan seterusnya.

Tetapi di dalam organisasi internasional entah di dalam apa *human right council* maupun di dalam majelis umum PBB dan seterusnya *one country one vote* itu nilai Fiji sama dengan nilai Australia itu kira-kira begitu. Jadi ini saya kira penting untuk didekati gambaran-gambaran tentang bagaimana suatu saat Fiji akan memainkan peranan penting dalam konteks kedaulatan kita atas Papua. Dalam diplomasi politik luar negeri kita untuk meyakinkan kepada dunia dan bagaimana mungkin barangkali kita akan mendapatkan beberapa gambaran terkait intelijen militer tentang beberapa orang-orang katakanlah Papua yang ada di Fiji dan seterusnya. Tapi itu sesuatu yang saya kira tidak cukup terlihat di dalam apa namanya naskah akademik ya sehingga itu menjadi catatan penting. Karena dalam bayangan saya hal seperti itu nanti akan bisa menjadi salah satu karakter atau ciri yang perlu diperkuat di Dewan Perwakilan Rakyat ketika nanti ada dialog antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah.

Yang kedua adalah perubahan geopolitik di dalam 7 sampai 8 tahun belakangan ini Pasifik juga Pasifik Selatan itu menjadi ajang pertarungan di antara beberapa kekuatan besar merosotnya Amerika Serikat dan Prancis di kawasan itu disertai dengan menguatnya Rusia, China, dan India, India baru mulai tahun 2017 kemarin China mulai tahun 2016 Rusia sudah mulai tahun 2011. Tapi intinya adalah bahwa bukan tidak mungkin bahwa di dalam waktu katakanlah 15 tahun ke depan pada tahun 2035-an itu akan terjadi pergeseran geo-politik yang

luar biasa di kawasan itu. Nah kalau kita sudah mempunyai teman yang namanya Fiji katakanlah maka bukan tidak mungkin kalau kita akan mempunyai semacam *diplomatic political and military footprint* di Pasifik itu sehingga kemudian ini menjadi sesuatu yang saya kira sangat penting.

Tapi intinya itu tadi Bapak Pimpinan dan Anggota DPR yang terhormat ini adalah sebuah investasi diplomasi, investasi pertahanan, dan investasi politik luar negeri masa depan Indonesia jadi walaupun sekarang barangkali secara fisik finansial dan material tidak cukup menghasilkan sesuatu *in returns* itupun saya kira merupakan sesuatu yang sangat baik untuk tetap bisa di diselenggarakanlah.

Saya kira ada beberapa hal yang. Oh ya ini persoalan yang saya singgung di butir sana sebenarnya tentang Fiji sedikit negara saya kira yang di Pasifik Selatan yang mendukung posisi Indonesia di dalam kasus Papua. Saya yakin ini akan ini akan masih menjadi persoalan panjang saya tidak terlalu risau tentang *New York Agreement*. Saya tidak terlalu risau juga tentang misalnya Pepera dan segala macam itu yang menurut hukum internasional cukup kuat tetapi isu Papua dugaan saya dalam beberapa tahun ke depan akan semakin bergeser ke arah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu adalah apa yang kira-kira disebut sebagai *corrective self determination*. Jadi tidak lagi berhubungan dengan *sovereignty* atas teritori tapi terkait dengan beberapa *political human rights ahead justice reform* yang diperlukan di Papua kira-kira atas tuntutan internasional.

Nah meskipun itu relevansinya lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan kedaulatan wilayah. Tapi saya kira itu tetap akan merupakan sesuatu yang penting untuk kitaantisipasi dan sekali lagi dalam konteks itu mempunyai teman seperti Fiji saya kira akan sangat perlu.

Nah walaupun ada sesuatu yang saya tidak terlalu nyaman atau apa atau paling tidak mempunyai pertanyaan Curie ya saudara Pimpinan adalah tentang detail itu. Detail beberapa hal yang terkait dengan misalnya adalah kunjungan kemudian adalah dialog konstruktif kemudian intelijen militer. Akan sangat menarik sebenarnya kalau itu ada detailnya masing-masing. Karena kerap kali kunjungan itu sebenarnya mempunyai tujuan yang macam-macam kalau kunjungan itu sekedar melihat maka kemudian itu penting untuk *confidence building measure* tapi itu tidak terlalu produktif untuk tujuan yang lain kalau intelijen militer itu apa yang mau dilakukan dan segala macam.

Tapi dasar orang Jawa, Pimpinan, kelemahan itu kadang-kadang merupakan sesuatu yang akan membuka ruang *maneuver* dan membangun kreativitas kita kan kira-kira begitu ya jadi disitu saya kira nanti Dewan Perwakilan Rakyat bisa memainkan peranan penting. Kalau seandainya antara Pasal 1 dan Pasal 2 yang ada dalam tradisi penulisan ratifikasi itu disisipkan pasal lain yang isinya tentang mekanisme, prosedur, ruang lingkup, tentang kerja sama pertahanan. Maka bukan tidak mungkin kalau itu akan bisa menjadi cantolan ketika Dewan Perwakilan Rakyat nanti bertemu dan meminta pertanggung jawaban baik pertanggung jawaban kebijakan, pertanggung jawaban pengawasan maupun pertanggung jawaban anggaran terhadap apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam hal ini.

Jadi di itu saya kira yang ingin saya sampaikan sekali lagi ini merupakan bagian penting dari diplomasi pertahanan Indonesia. Yang mohon Curie mengoreksi saya ya kalau saya keliru saya ada kesan bahwa Kementerian Pertahanan maupun TNI itu melakukan banyak hal yang terkait dengan diplomasi pertahanan dan diplomasi militer.

Tapi terus terang saya tidak terlalu yakin bagaimana diplomasi pertahanan yang mereka lakukan itu merupakan bagian yang *fully integrated* dengan diplomasi politik luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Padahal kalau kita melihat tadi apa yang dilihat dalam kasus misalnya Papua misalnya itu jelas sesuatu yang tidak mungkin diselesaikan oleh TNI saja. Kecil kemungkinan bisa diselesaikan pertahanan saja dan juga nyaris tidak mungkin

diselesaikan oleh Kementerian Luar Negeri karena itu merupakan sebuah agenda kerja sama bersama.

Nah akibatnya adalah dari beberapa pengamatan saya terkait dengan Undang-Undang Ratifikasi khususnya di bidang kerja sama pertahanan ini saya justru membayangkan kalau diplomasi pertahanan akan merupakan simpul baru Pak Pimpinan ya. Merupakan instrumen penting dari Indonesia sampai tahun 2045. Saya nggak ragu tahun 2045 paling tidak menurut rekan saya Curie Indonesia akan mempunyai kekuatan Militer yang tangguh tapi saya mempunyai pertanyaan besar *how to get there* antara tahun 2020 katakanlah sampai tahun 2045.

Nah ketika masih ada ruang itulah maka kemudian saya menganggap diplomasi pertahanan yang merupakan sinergi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Markas Besar TNI akan merupakan *assymetric equalizer*. Merupakan suatu alat yang bisa kita optimalisasi kan sebelum kita pada tahun 2045 memanjangkan diri sebagai sebuah tonggak negara minimal negara *middle power*.

Jadi mohon maaf saya tidak terlalu substantif terkait dengan Undang-Undang Ratifikasi saya menulis di dalam rekomendasi. Saya kira tidak ada konsekuensi negatif dari ratifikasi yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kerja sama Indonesia dan Fiji. Persoalannya tidak terletak di beberapa nilai negatif atau risiko tapi persoalannya akan terletak di Dewan Perwakilan Rakyat tentang bagaimana *optimilizing* mengoptimalkan peran itu untuk bisa menggunakan ratifikasi ini sebagai pijakan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk bisa betul-betul memainkan peran sebagai wakil rakyat dalam sebuah kerangka demokratik meminta pertanggung jawaban kepada apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan negara. Kalau itu bisa dilakukan saya kira akan merupakan kontribusi yang sangat besar untuk beberapa tahun ke depan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan terima kasih.

*Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
Assalamualaikum.*

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Walaikumsalam

Terima kasih Pak Profesor Kusnanto untuk pendalaman sebelah kanan saya ada Pak Rizky sebelah kiri saya ada Wakil Ketua MPR mantan Menteri juga Bapak Sjarif Hassan silakan Pak Rizky duluan atau Pak Syarif.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH):

Terima kasih Pak Ketua. Ruangan ini penuh Profesor hari ini Pak. Karena dari kami juga ini sebentar lagi beliau apa akan diangkat menjadi guru besar dan kita mungkin secara terbuka hari ini menyampaikan sukses selamat sampai bertemu nanti di Makassar Pak Sjariefhassan, mantan Menteri Profesor pula Pak kalau di Inggris Anggota DPR itu sebutannya *the Honorable Gentleman* kalau mantan menteri atau pernah di kabinet *the Right Honorable Gentleman* luar biasa selamat Pak.

Tapi terima kasih tadi paparannya dari para antara sumber yang luar biasa hari ini saya ucapkan apresiasi sebesar-besarnya. Tapi mungkin tadi ada beberapa catatan penting yang saya garis bawahi karena dari narasumber pertama ataupun kedua sepertinya *weight* atau beban dari pemikiran dari apa pun yang dipaparkan tadi lebih ke pro-nya sekarang saya minta lebih ke *cons-* nya. Karena tadi Ibu Curie juga sudah menyampaikan dari segi *reciprocity*

atau *reciprocity* tidak terlalu banyak yang bisa di harapkan begitu juga tadi yang disampaikan oleh Prof Kusnanto. Apalagi kita tahu bahwa negara Fiji ini dari sejak kemerdekaannya hingga saat ini selalu dilanda distabilitas politik dan lain sebagainya.

Tapi saya juga pahami bahwa Justru dengan hal tersebut jika nanti sampai ada pergantian pemerintahan dan sebagainya bagaimana Indonesia harus bisa tetap menjaga hubungan yang baik dengan negara Fiji sebagaimana yang tadi Pak Prof Kusnanto sampaikan bahwa ini adalah *long term investment* baik dari segi diplomasi pertahanan atau diplomasi kedaulatan dari negara kedua negara kita.

Saya hanya ingin ada satu pertanyaan Pak Ketua. Tadi Pak Prof Kusnanto sudah menyampaikan bahwa dalam apa namanya rancangan nanti yang kita akan bahas atau setuju hanya terdapat dua sampai tiga pasal. Memang sepertinya selalu seperti ini Pak jadi tidak terlalu banyak dari pihak DPR atau dari kami yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa akan ada *check and balances* yang jelas.

Tapi dari yang tadi Bapak paparkan apalagi kan *covert* atau yang terpendam dari ini semua adalah diplomasi kedaulatan tadi. Yang secara tidak tertulis tapi kita semua paham bahwa ini adalah menyangkut isu kedaulatan kita. Ini menyangkut isu Papua. Kalau soal pertahanan tadi dibawakan sekoci atau apa namanya rumah sakit apung dan lain sebagainya oke *good* tapi kita mengharapkan apa sih? Apa yang kita bisa pegang di DPR RI walaupun dari segi pasal per pasal tidak bisa kita lakukan *check and balances* yang jelas, tapi hasil apa terutama dari isu kedaulatan dari aspek kedaulatan yang kita bisa pastikan harus bisa terlaksana dengan adanya apa kerja sama pertahanan atau *defence cooperation agreement* antara 2 negara ini dalam beberapa tahun ke depan? Untuk kita bisa jadi pegangan oh kita melakukan kerja sama dengan Fiji ada hasilnya. Yang kalau tidak terjadi berarti kita bisa pastikan atau kita bisa katakan bahwa kerja sama pertahanan Indonesia dengan Republik Fiji atau dengan Fiji ini tidak terlalu membuahkan manfaat. Jadi adakah poin-poin tersebut yang kita bisa pegang di di DPR RI dijadikan sebagai pegangan. Mungkin cukup Pak Ketua pertanyaan dari saya terima kasih.

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Terima kasih yang terhormat Rizky Natakusumah selanjutnya yang terhormat Bapak Sjarief Hassan silakan Pak.

F-PD (DR. H. SJARIFUDDIN HASAN, S.E., M.M., M.B.A.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Narasumber
Para Profesor Dan Mbak.**

Saya mengucapkan terima kasih atas paparannya cukup jelas dan komprehensif. Begitupun juga pandangan-pandangannya tentang jangka panjang kalau hubungan kita dengan Fiji bisa ditindaklanjuti dalam bentuk DCA ini. Saya sepakat dengan apa yang Prof sampaikan bahwa dan juga sudah disampaikan dengan oleh rekan saya ini Pak Rizky ini kader kami kader potensial dari Demokrat ini dari *the rising cadre* dari Demokrat ini.

Saya setuju dengan apa yang Prof sampaikan bahwa ini adalah merupakan yang paling substansi adalah bagaimana kita menjaga kondisi politik yang berada di Asia-Pasifik. Karena kita tahu sendiri bahwa di Pasifik Asia-Pasifik ini itu ada negara yang betul-betul komit

mendukung Indonesia seperti Fiji dan sebagainya. Tapi ada juga yang sedikit sedikit genit lah istilahnya dia adalah negara kecil tetapi banyak mempengaruhi juga opini publik di dunia. Terima kasih pemaparannya dan cukup komprehensif menurut saya dan saya setuju apa yang disampaikan oleh para narasumber bahwa ini salah satu strategi untuk bagaimana kita menghadapi Asia-Pasifik itu ke depan.

Saya hanya ingin mendapatkan gambaran dari para narasumber saya melihat bahwa Fiji ini bisa merupakan jembatan bagi kita untuk eksistensi Indonesia di negara-negara Pasifik. Bahwa kita itu adalah negara wilayah kedaulatan kita adalah sudah *final* dan tidak ada sesuatu yang perlu untuk di persoalkan lagi khususnya menyangkut masalah Papua dan saya ingin mendapatkan sedikit gambaran negara-negara di Pasifik ini kira-kira Fiji itu bagaimana kira-kira posisinya? Apakah dia termasuk negara-negara yang cukup dipandang diantara negara-negara Pasifik, *polynesian* khususnya karena ini juga akan berpengaruh. Jadi kalau memang Fiji itu adalah cukup berpengaruh maka tentu akan bagus kalau kita memperkuat posisi kita di sana dengan meningkatkan kerja sama.

Tetapi kalau toh ternyata memang Fiji itu tidak terlalu berpengaruh maka mungkin strategi ke depan adalah kita semakin memperbanyak hubungan kerja sama DCA dengan negara-negara yang lain. Ini juga saya pikir akan menguntungkan Indonesia dan saya juga setuju apa yang disampaikan narasumber bahwa Fiji dan Indonesia memang *is not comparable* karena kita memiliki banyak *advantage* dibandingkan dengan Fiji. Tetapi sekali lagi sekecil apapun negara yang berada di Pasifik itu juga akan mempengaruhi opini dunia sehingga pasti dipastikan bagus bagi Indonesia kalau untuk memelihara hubungan dengan baik dengan negara-negara Pasifik. Saya pikir itu saja Pak Ketua sekali lagi terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Baik terima kasih Pak Profesor Sjarief Hasan yang sebentar lagi hari Kamis tidak bisa sama-sama Pak ya. Baik silakan selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan waktu dan tempat kami persilakan. Sebentar dari virtual ada yang mau bertanya tidak Pak Sturman bapak Mayor Jenderal Sturman apakah mau bertanya? Tolong cabut *earphone* Pak karena kami tidak bisa mendengar Bapak.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Halo Pak.

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Bisa kami mendengar silakan dilanjut.

F-PDIP (MAYJEN TNI MAR. (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Begini Pak, jadi terima kasih paparannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang saya hormati.

Memang hari ini di dominasi teman-teman dari Fraksi Demokrat saya sangat bangga itu walaupun yang lain pergi kemana-mana tapi teman-teman di Pimpin Ketua Wakil ketua yang gagah berani ada Profesor juga ada *the rising star* di Demokrat hadir juga luar biasa Pak saya bangga itu terima kasih.

Terima kasih Pak atas paparannya bagaimana kita menanggapi hubungan Indonesia dengan Fiji kalau kita lihat negara Fiji ini negara kecil kita di Pasifik Selatan. Kemudian juga terjadi kepulauan yang mirip Indonesia kemudian juga dia boleh dikatakan penduduknya terbesar di salah satu pulau 83% di satu pulau yang besar lainnya kecil-kecil dan juga tidak terlalu banyak.

Dari segi Militer sebenarnya kita hampir jarang ya karena saya dulu terlatih dengan mereka tapi bukan berarti kita tidak punya hubungan justru hubungan mereka itu menurut saya bisa kita yang dalam konteks peralatan militer yang sekarang kita (suara tidak jelas) oleh Kemenhan.

Artinya adalah pasti ada *benefit* apabila kita membuka hubungan diplomatik dengan Fiji baik pertahanan maupun yang lain tapi seperti yang dikatakan Pak Syarif Hassan tadi wilayah itu adalah wilayah yang sering kali mempengaruhi saudara-saudara kita yang ada di Papua karena ... (ucapan tidak jelas) mereka dan asal usul mereka. Menurut saya atau menurut Bapak katakanlah demikian apakah pengaruh politik itu dapat mempengaruhi Papua di dunia internasional? Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita dengan Fiji ini secara militer kita lebih besar lebih kuat tapi bagaimana *benefit* yang bisa kita dapatkan apabila secara militer di samping kita juga bisa saja menjual peralatan Militer kita yang dibuat oleh Indonesia di sana.

Yang ketiga Pak wisata juga kita lihat secara pariwisata karena negara itu mirip sekali dengan Indonesia negara kepulauan walaupun jumlahnya sekitar 322 pulau tapi apa yang bisa kita bikin wisata di sana dengan negara tersebut? Ini Pimpinan yang saya tanyakan terima kasih atas waktu yang diberikan Pimpinan sukses selalu merdeka.

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Merdeka Pak Sturman. Baik ada lagi yang lain? Pak Sukamta apa masih rapat fraksi? Baik kalau tidak ada kita kembalikan kepada para narasumber untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan disini waktu dan tempat kami persilakan Pak.

PAKAR/AKADEMISI (KUSNANTO ANGGORO, PH.D.):

Saya agak lupa Pak apa yang mau saya sampaikan. Tapi begini Pak Pimpinan dan Bapak-bapak Anggota dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kebetulan saya itu Jawa. Jawa itu mempunyai *etos tuno satak bathi sanak* itu artinya adalah kehilangan atau kerugian material walaupun sedikit itu tidak apa-apa asal bisa membangun persahabatan dengan orang lain.

Saya tidak tahu apakah itu menjadi bagian dari pemikiran Indonesia modern sekarang apakah ada di kalangan Menteri Luar negeri seperti Bu Retno yang berpikir seperti itu atau juga Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Tapi saya selalu berasumsi bahwa *kekancan* atau berteman baik itu tidak bisa dinilai dari segi materi terutama dalam konteks investasi jangka panjang.

Itu tadi yang saya kira perlu menjadi pegangan kita untuk mencapai masa depan. Tentu saja dalam jangka pendek kita harus membangun sesuatu yang lebih material keuntungannya itu yang sayang sekali itu tidak bisa kita jawab dengan mudah karena ada beberapa instrumen yang belum lengkap. Misalnya saja adalah walaupun kita ingin menempatkan diri bersama Fiji itu sebagai *hub* antara asia Tenggara dengan Pasifik Selatan tentu akan sangat menguntungkan untuk industri pariwisata dan segala macam.

Tapi apakah itu kita bisa *capitalize on* agak sulit sekarang misalnya karena masih ada beberapa hal yang belum jelas tentang bagaimana nasib *flight information region* Indonesia dengan Singapura bagaimana perundang-undangan pariwisata di Indonesia, bagaimana pengembangan UMKM maupun pengusaha pariwisata di Indonesia dan segala macam. Tapi sekali lagi dalam jangka waktu jangka panjang kalau bayangan saya tadi sampai tahun 2045 mestinya 5 atau 10 tahun ke depan seharusnya hal-hal penting itu bisa kita selesaikan kalau itu bisa kita selesaikan, maka bukan tidak mungkin kalau Fiji menjadi salah satu hak penting bagi Indonesia di negara-negara Pasifik Selatan.

Tentu ada risiko saya sependapat sekali dengan anggota yang disampaikan Rizky dari Partai Demokrat ya tentang stabilitas politik. Saya juga masih ingat ketika waktu saya kuliah di Fiji ada kudeta militer segala macam pada tahun 1983 ada robusta waktu itu yang melakukan kudeta. Tapi saya kira dalam hubungan internasional berlaku prinsip *non interederence and domestic affair* dan khususnya antara Indonesia dan Fiji saya kira itu sangat kuat. Sehingga kalau saja terjadi perubahan politik di Fiji sekalipun maka kemungkinan besar atau kesepakatan antara Indonesia dan Fiji yang akan diratifikasi tidak akan di *revoke* ya tidak akan dianul (baca: anulir) oleh Fiji masih akan tetap berlaku. Jadi tidak merupakan sesuatu yang perlu kita risaukan betul lah itu.

Kemudian jadi Profesor Syarief Hasan juga menyampaikan Fiji saya kira merupakan negara penting untuk khususnya di Pasifik Selatan. Mungkin saja kalah vokal dengan Vanuatu tapi dari segi diplomasi saya kira Fiji merupakan negara yang bisa dibilang paling kuat di antara negara-negara Mikronesia dan Polinesia terutama adalah di *peacekeeping operation*. Kontingen-kontingen Fiji saya kira sering mendapat pujian dan sebagainya. Yang barangkali itu akan menjadi salah satu keuntungan yang bisa timbal balik.

Kalau tadi jumlah keuntungan hubungan Indonesia Fiji pada umumnya tidak *reciprocal* ya *Curie* ya tapi di dalam konteks ini *peacekeeping operation* saya kira Fiji dan Indonesia bisa timbal balik bukan dari segi kapabilitas Profesor syarif Hassan ya tapi terutama dari segi akseptabilitas dan reputasi. Kita tahu bahwa Indonesia punya Sentul yang sebenarnya luar biasa dari segi potensinya. Tapi reputasi dan akseptabilitas Indonesia untuk *peacekeeping* saya kira masih sulit ya untuk mencapai target yang Pak SBY pernah apa merencanakan sampai 4.000 segala macam sampai sekarang juga belum tercapai.

Meskipun sekali lagi persoalannya disitu bukanlah persoalan tentang kemampuan Indonesia tapi lebih terkait dengan akseptabilitas dan reputasi Indonesia. Jadi dalam hal itulah maka kemudian hubungan antara Indonesia dan Fiji dalam konteks *peacekeeping* saya kira akan akan bisa menjadi salah satu pijakan yang penting saya kira ya. Seperti kita tahu luar biasa fasilitas yang ada di Sentul itu untuk dioptimalkan menjadi bagian dari instrumen diplomasi pertahanan Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini merupakan salah satu pijakan.

Kalau boleh satu hal lagi yang terkait dengan pandangan negara-negara pasifik Selatan terhadap misalnya adalah isu Papua tentu saja itu akan tergantung terhadap pemerintahan yang berkuasa dan bisa jadi akan berubah beberapa tahun sekali. Yang membedakan Fiji dengan Vanuatu adalah bahwa komitmen Vanuatu terhadap kemerdekaan dan kepentingan Melanesia itu ada di dalam konstitusi. Jadi saya kira Vanuatu ruang geraknya agak lebih sempit dibanding Fiji ketika mengemukakan tentang misalnya dukungan kepada Papua dan seterusnya. Pada hal yang sama tidak ada di dalam konstitusi Fiji dan juga konstitusi beberapa negara lain seperti Nauru, Kiribati dan sebagainya.

Jadi saya yakin bahwa Papua masih akan menjadi isu internasional meskipun tidak seintens masa lalu. Tapi ada juga perbedaan atau gradasi dukungan antara negara-negara yang menurut Indonesia negara yang *all out* mendukung Papua Merdeka misalnya adalah Vanuatu karena kemerdekaan Melanesian ada di dalam konstitusi mereka. Sedangkan dalam konteks Fiji ini tidak ada dalam konstitusi jadi mereka lebih sifatnya lebih dinamis tapi justru

karena dinamis itu membuka ruang antara ke kanan atau kiri setuju atau tidak maka kemudian oleh karena itu pula maka ini menjadi ratifikasi ini menjadi instrumen untuk memelihara supaya selamanya Fiji akan berada di pihak Indonesia dalam konteks kedaulatan Indonesia atas Papua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan Curie.

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Terima kasih Prof ada sambungan dari Profesor maaf saya salah sebut Profesor Curie atau Curie.

PAKAR/AKADEMISI (CURIE MAHARANI SAVITRI, PH.D.):

Curie saya dinamai setelah ilmuwan Prancis Marry Curie harapannya orang tua sangat susah.

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Itu curi Pak bukan Curie.

PAKAR/AKADEMISI (CURIE MAHARANI SAVITRI, PH.D.):

I got that a lot. Apa tadi merespon Pak Syarif Hassan dan Pak Rizky tadi ya. Apakah posisi Fiji ini relatif dan *power* itu bisa elastis itukan. Jadi kalau di mata kita Fiji itu kecil dengan segala perbandingan *power* tadi akan tetapi bagi negara sekelilingnya di Melanesia dan di apa di Pasifik Fiji itu kalau tidak bisa dibilang terbesar adalah salah satu yang terbesar. Dan Fiji juga sangat aktif ya untuk menjalin hubungan dengan organisasi internasional misalnya seperti *Asian Development Bank*. Fiji adalah negara pertama yang menyelenggarakan pertemuan tahunan ADB di sana. Jadi kesan yang kita dapatkan dari Fiji adalah memang sangat berusaha untuk menjadi sebuah *regional hub* di mana hubungan dengan pihak internasional itu melewati Fiji dulu kemudian di distribusikan ke negara-negara lain di Pasifik sebagai teritorinya.

Juga yang kedua kalau kita lihat tadi ya menyambung masalah dilema diplomasi pertahanan apakah pelaksanaan diplomasi pertahanan ini akan dipengaruhi oleh sikap Fiji baik itu ke dalam maupun ke luar negeri. Misalnya ke dalam negeri ada kudeta pelanggaran HAM kemudian apa kudeta pemerintah demokratis di sana apakah itu kemudian berpengaruh. Menindak lanjuti kudeta yang pernah terjadi di Fiji di awal 2000-an ya bahkan PBB saja enggan untuk memutuskan keikutsertaan dalam misi perdamaian karena memang sudah sangat *reliable* ya sebagai sebuah negara pengirim pasukan perdamaian Fiji itu. Jadi bahkan PBB saja melihat apa yang terjadi di dalam negeri Fiji itu terpisah dari kontribusi mereka terhadap perdagangan internasional. Meskipun ini kalau kita lihat seperti jadi kayak *double* standar begitu ya tapi itu salah satu dilema diplomasi pertahanan nanti menjadi PR Kemlu ya untuk putus begitu. Bagaimana? Oh oke *sorry* jadi ini salah satu PR bagi Kementerian Luar Negeri untuk memutuskan sejauh mana perilaku Fiji ini mempengaruhi level diplomasi dan kerja sama yang akan kita lakukan bersama.

Kemudian, oke hal lain adalah tadi saya sepakat dengan Mas Kusnanto ya bahwa memang kita harus melihat ini sebagai investasi jangka panjang investasi diplomasi tapi mengingat perbedaan persepsi itu bisa terjadi perbedaan prioritas dan *budget* antar kementerian/lembaga bisa terjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita setelah ini diratifikasi dan mengaktifkan *ad-hoc* tim antar dua negara di dalam negeri kita memastikan bahwa Kementerian Luar Negeri memiliki strategi diplomasi terhadap Fiji dan Kementerian Pertahanan dan TNI adalah pelaksanaan dari strategi tersebut.

Bukan cuma di Indonesia saya rasa ketidaksinkronan antara Kemlu dengan Kemhan serta angkatan bersenjata kan juga terjadi di negara lain sampai ada adagium yang mengatakan bahwa Kementerian Luar negeri itu seringkali yang terakhir tahu dengan apa yang dilakukan oleh angkatan bersenjatanya dengan aktor lain di luar negeri.

Jadi jangan sampai itu terjadi. Meskipun tadi saya katakan kita tidak ada *security interdependence* dengan Fiji tapi kita harus melihat Fiji memiliki posisi strategis untuk menjaga kedaulatan kita ya. Karena apa coba kita yang coba kita lihat yang terjadi di Ukraina ya apa negara besar dengan mudahnya bisa mengintervensi negara lain atas dasar pelanggaran HAM yang itu tidak perlu dibawa ke pengadilan HAM internasional atau bahkan sebenarnya kan di PBB sendiri ada pertemuan di Geneva setiap tahun untuk membahas kondisi HAM masing-masing negara ya itu kan bisa digunakan sebagai forum untuk mengkritisi dan juga memberikan PR pada negara tersebut untuk perbaikan HAM.

Ini kan ada yang punya *power* kemudian tidak menggunakan sistem yang ada kemudian bisa mengintervensi. Jangan sampai itu terjadi di negara kita kita melihat Fiji sekarang bukan sebagai ancaman tapi ke depan dengan perubahan geo-politik bisa terjadi satu *proxy* yang kemudian menyulitkan kita dari negara-negara terdekat kita sendiri. Mungkin terlalu berlebihan tapi ini satu satu potensi yang harus kita pertimbangkan *prepare for the worse* ya dan dan apa namanya bersiap-siap untuk yang terburuk tapi kita juga harus selalu *prepare* mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih.

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Terima kasih, Profesor Huala ada tambahan?

PAKAR/AKADEMISI (PROF. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D.):

Sedikit saja Pak saya memperkuat pendapatnya Prof Kusnanto Anggoro bahwa saya setuju sekali Pak bahwa persetujuan ini merupakan *quote and quote* aset bagi pemerintah di dalam menjalin *quote and quote*, teman Pak pertemanan sekutu teman ya teman teman pemerintah dalam menghadapi tadi sudah disebut secara jelas Vanuatu Pak. Karena Vanuatu itu salah satu negara yang yang terus-menerus Pak 2016, 17, 18, 19 sampai 2020 kemarin mengangkat isu HAM Papua ini jadi minimal dengan ada kawan di sana dengan gugus Pulau Melanesia ini ya ada yang menjadi teman kita di mendukung kita.

Saya lihat juga mengenai masa depan Fiji dengan memiliki pengalaman sejarah yang hampir sama Pak ya miriplah, pernah dijajah oleh negara-negara barat dan pada pertengahan 70-80 terjadi banyak gejolak politik. Tetapi dengan zaman sekarang dengan pemerintah sekarang yang lebih terbuka, lebih terbuka kepada ada masyarakat internasional. Saya masa depan Fiji saya lihat Pak dengan banyaknya kerja sama juga dengan kita mereka jawaban sementara saya masa depan mereka dengan mempertimbangkan masa lalu dan sekarang keadaan di sana saya positif lah ya bagi negara Fiji dengan terbukanya dengan banyaknya kerja sama kerja sama dengan negara-negara tetangga termasuk Indonesia terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.SI.):

Terima kasih ada lagi yang lain? Kalau tidak, kita cukup Pak terima kasih atas masukannya ini kita tidak bikin kesimpulan karena ini RDPU namun masukan dari Bapak yang kami tangkap bahwa 1000 kawan masih kurang 1 musuh kebanyakan intinya itu Pak ya.

Jadi nggak ada salahnya bukan masalah untung dan rugi tapi masalah berkawan itu sangat diperlukan untuk apa pun. Jadi saya terima kasih masukannya semuanya dengan

demikian maka pertemuan pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* rapat kami tutup.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.49 WIB)
(KETUK PALU: 3X)**

**Jakarta, 22 Maret 2022
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,**

**SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001**